



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR 37 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumen perencanaan perangkat daerah memiliki peran strategis dalam pelaksanaan perencanaan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program kegiatan dan/atau sub kegiatan, penyusunan perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2024 berpedoman pada Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;



9

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil Di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Blitar Nomor 1);
10. Peraturan Walikota Blitar Nomor 28 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2024 Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Blitar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Blitar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah Kota Blitar untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Walikota dengan berpedoman pada RPJPD Kota Blitar serta memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional.
6. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.

7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja-PD merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2024.
- (2) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah yang disusun mengacu pada Perubahan RKPD.
- (3) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Perubahan RKA - SKPD.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - BAB I : Pendahuluan.
 - BAB II : Hasil Evaluasi Renja - PD Tahun Lalu.
 - BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.
 - BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.
 - BAB V : Penutup.
- (2) Rincian Perubahan Renja-PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 4

Perubahan Renja-PD terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- c. Inspektorat Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- d. Dinas Pendidikan Kota Blitar Tahun 2024;
- e. Dinas Kesehatan Kota Blitar Tahun 2024;
- f. Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar Tahun 2024;
- g. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Blitar Tahun 2024;
- h. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Blitar Tahun 2024;
- i. Dinas Sosial Kota Blitar Tahun 2024;
- j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar Tahun 2024;
- k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Blitar Tahun 2024;
- l. Dinas Lingkungan Hidup Kota Blitar Tahun 2024;
- m. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar Tahun 2024;
- n. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024;
- o. Dinas Perhubungan Kota Blitar Tahun 2024;
- p. Dinas Kepemudaan dan Olah Raga, Kota Blitar Tahun 2024;
- q. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar Tahun 2024;
- r. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Blitar Tahun 2024;
- s. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Tenaga Kerja Kota Blitar Tahun 2024;
- t. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Tahun 2024;
- u. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2024;
- v. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Blitar Tahun 2024;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- x. Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- y. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024;

- z. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Blitar Tahun 2024;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Blitar Tahun 2024;
- bb. Kecamatan Sananwetan Kota Blitar Tahun 2024;
- cc. Kecamatan Sukorejo Kota Blitar Tahun 2024; dan
- dd. Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar Tahun 2024.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 8 Agustus 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Diundangkan di Blitar
Pada tanggal 8 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR,

ttd.

PRIYO SUHARTONO

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024 NOMOR 37

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


IKA HADI WIJAYA, S.H., M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

24. PERUBAHAN RENCANA KERJA BADAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Blitar Tahun 2024. RKPD merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan. Penyusunan RKPD mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional, dalam rangka mensinergikan, mensinkronkan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dengan pembangunan di daerah.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 264 ayat(5) disebutkan bahwa RKPD dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Selanjutnya sesuai Permendagri 86 tahun 2017 pada pasal 343 disebutkan Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

- Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau;
- Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar dalam pelaksanaan program kegiatan sampai dengan triwulan 2 (dua) pada tahun 2024 ini, terdapat beberapa kondisi yang menjadi dasar pertimbangan untuk melakukan perubahan atas dokumen Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024. Hasil evaluasi atas kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan triwulan kedua tahun 2024, menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Perubahan didasarkan adanya kebijakan standar harga baru yang mempengaruhi pendapatan dan belanja tahun 2024 serta didasarkan pada evaluasi kinerja sampai dengan triwulan II tahun 2024 dan Laporan Realisasi Anggaran tahun 2023, antara lain sebagai berikut:

- Keadaan yang menyebabkan defisit anggaran tahun anggaran sebelumnya, sehingga perlu dilakukan refocusing anggaran untuk tahun berjalan;
- Kondisi sarana prasarana penunjang kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang dipandang prioritas; dan

- Perubahan rekening belanja dan besaran standart harga serta efisiensi anggaran maupun hal-hal yang terkait penyesuaian alokasi belanja lainnya guna mendukung pencapaian kinerja tahun 2024.

Implikasi yang timbul akibat kondisi diatas, maka tindakan perencanaan yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Renja Tahun 2024 yang berpedoman pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024, sedangkan tindakan penganggaran yang dilakukan adalah melakukan Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan pada Perubahan Renja Tahun 2024 sebagai dasar untuk Perubahan Rencana Kerja Anggaran Tahun Anggaran 2024 pada mekanisme Perubahan APBD Kota Blitar Tahun 2024.

Dari sisi dinamika penyelenggaraan pemerintah daerah, beberapa perubahan kebijakan juga perlu diambil terkait upaya-upaya pencapaian target-target RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026, khususnya target indikator kinerja daerah pada tahun 2024. Dengan berbagai perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur maupun Pemerintah Kota Blitar yang harus disesuaikan, maka kiranya perlu dilakukan Perubahan atas Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 yang didasarkan pada asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, serta rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024. Sehingga penyusunan Perubahan Renja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada program strategis daerah yang tertuang dalam Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.

1.2 Landasan Hukum

Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2024 berdasarkan pada landasan perundang - undangan penyusunan perubahan Renja PD Kota Blitar Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

- Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 20 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
 21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
 22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 20 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2022 Nomor 20);
 23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
 24. Peraturan Walikota Blitar Nomor ... Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan BKPSDM Tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RKPD Tahun 2024.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II Evaluasi Renja sampai dengan Tribulan II Tahun Berkenan

BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN TRIBULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan 2 urusan penunjang pemerintahan, 3 program dengan 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan, dengan anggaran Belanja Rp. 12.392.212.391,- dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 6.097.750.858,- atau 49,21%. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan:

- Adanya perubahan besaran standar satuan harga, sehingga terjadi efisiensi anggaran;
- Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan, yaitu :
Pengadaan CASN, pengiriman peserta peningkatan kompetensi disesuaikan dengan instansi pembina/penyelenggara diklat dan uji kompetensi pada tribulan III dan IV.

Tabel. 2.1.

Evaluasi terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah
Tahun 2024

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Perangkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
	Tujuan: Meningkatnya Profesionalitas ASN		Tujuan: Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,5		70,89		80,3		77,84		87,14		87,14		87,14		108,25		BKPS DM		
	Sasaran: Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah		Sasaran: Nilai Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah	Nilai	A 86,38		A 85,49		A 86,36		A 85,49		A 85,49		A 85,49		A 85,49		98,97		BKPS DM		
1		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	84	39.960.480.892	87	8.016.333.470	83,5	9.276.254.499	85,03	1.575.928.926	86,85	3.051.289.032	86,85	4.627.217.958	86,85	12.643.551.428	103,39	31,64	BKPS DM		
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen Perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart	%	100	195.197.408	100	16.193.100	100	10.032.500	25	0	25	2.650.000	50	2.650.000	50	18.843.100	50,00	9,65			
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	40	79.284.748	10	4.454.300	10	7.068.000	2	0	4	2.650.000	6	2.650.000	16	7.104.300	40,00	8,96			

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lapora n	32	174.882.460	8	11.738.800	8	2.964.500	5	0	2	0	7	0	15	11.738.800	46,88	6,71	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			43,44	7,84	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standart	%	100	26.960.863.465	100	7.696.124.866	100	8.357.549.689	25	1.450.959.203	25	2.746.599.494	50	4.197.558.697	50	11.893.683.563	50	44,11	BKPS DM
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang /bula n	414	26.927.200.528	108	7.690.055.866	104	8.355.549.689	101	1.450.959.203	101	2.745.099.494	101	4.196.058.697	209	11.886.114.563	50,48	44,14	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Lapora n	48	33.662.937	12	6.069.000	12	2.000.000	3	0	3	1.500.000	6	1.500.000	18	7.569.000	37,50	22,48	

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
				5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		50	33,31			
Predikat kinerja(%)																		SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah sesuai standart	%	100	1.927.281.015	100	245.090.904	100	250.798.100	25	1.258.400	25	160.758.400	50	162.016.800	50	407.107.704	50	21,12	BKPS DM	
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	8	269.106.965	3	114.100.000	2	50.000.000	0	0	1	19.680.000	1	19.680.000	4	133.780.000	50	49,71		
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	522.456.112	40	42.980.000	40	78.709.100	40	1.258.400	40	27.548.400	40	28.806.800	80	71.786.800	50	13,74		
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	160	1.135.717.938	40	88.010.904	45	122.089.000	0	0	45	113.530.000	45	113.530.000	85	201.540.904	53,125	17,75		
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		51,04	27,07			
Predikat kinerja(%)																		RENDAH	SANGAT RENDAH			
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standart	%	100	3.374.387.464	100	530.079.950	100	450.075.950	25	109.543.251	25	79.731.333	50	189.274.584	50	719.354.534	50	21,32	BKPS DM	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	12	422.180.569	3	22.949.600	3	30.994.100	2	7.602.625	0	9.272.800	2	16.875.425	2	39.825.025	16,67	9,43		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPDP Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	4	63.262.518	1	4.924.800	1	6.428.000	0	0	1	4.357.200	1	4.357.200	1	9.282.000	25,00	14,67			
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	144	330.644.773	28	26.482.500	36	50.406.000	8	7.797.000	7	4.485.000	15	12.282.000	15	38.764.500	10,42	11,72			
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12	199.616.922	3	42.044.000	2	42.987.600	1	3.332.000	0	9.402.000	1	12.734.000	1	54.778.000	8,33	27,44			
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	96	35.558.531	24	7.200.000	36	8.553.000	4	1.200.000	14	1.800.000	18	3.000.000	18	10.200.000	18,75	28,69			
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	146	2.248.124.152	84	426.479.050	60	299.997.250	24	89.611.626	0	50.414.333	24	140.025.959	24	566.505.009	16,44	25,20			
		Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dokumen	4	244.000.000	0	0	1	10.710.000	0	0	0	0	0	0	1	0	25,00	0,00			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			17,23	16,74			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang milik Daerah penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	260.000.000	100	220.740.000	100	28.976.660	25	0	25	0	50	0	50	220.740.000	50,00	84,90	BKPS DM		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%				
1		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	8	260.000.000	17	220.740.000	2	28.976.660	0	0	0	0	0	0	17	220.740.000	212,50	84,90			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			212,50	84,90			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	TINGGI			
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai kebutuhan	%	100	1.153.953.550	100	183.249.174	100	68.209.000	25	10.610.752	25	20.416.152	50	31.026.904	50	214.276.078	50	18,57	BKPS DM		
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	1	777.556.750	12	119.500.000	1	955.000	0	0	0	0	0	0	0	119.500.000	0,00	15,37			
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	48	376.396.800	12	63.749.174	12	67.254.000	3	10.610.752	3	20.416.152	6	31.026.904	18	94.776.078	37,50	25,18			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			18,75	20,27			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang terpelihara sesuai standart	%	100	633.057.544	100	109.538.466	100	110.612.600	25	3.557.320	25	41.133.653	50	44.690.973	50	154.229.439	50	40,4	BKPS DM		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	40	305.175.969	9	73.853.466	10	74.862.600	7	3.557.320	0	21.063.653	7	24.620.973	16	98.474.439	40	32,27	
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	388	184.836.476	92	35.685.000	80	35.750.000	5	0	46	20.070.000	51	20.070.000	143	55.755.000	36,86	30,16	
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			38,43	31,22	
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH	
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			75,00	38,45	
Predikat kinerja(%)																			SEDANG	SANGAT RENDAH	
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : tersedianya sumber daya yang mencukupi tersedia penyedia yang memenuhi persyaratan																					
Faktor penghambat pencapaian kinerja : terjadinya beberapa kali perbaikan dokumen pendukung kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : penyesuaian pada dokumen penganggaran atas hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan																					
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPD berikutnya : analisa kebutuhan dan kinerja																					
	Sasaran: Meningkatkan tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen yang baik		Sasaran: Indeks Sistem Merit	Indeks	300		271,5		280					271,5		271,5		271,5			

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp	
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13
2		PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase data kepegawaian yang valid	%	95	51.140.118.559	95	2.894.391.129	68	1.948.483.500	70,67	294.426.800	70,67	644.640.200	70,67	939.067.000	70,67	3.833.458.129	74,39	7,50	BKPS DM
			Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	%	74		52		61		67,19		67,19		67,19		67,19	0	90,80		BKPS DM
			Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	%	91,58		83,15		91,18		44,37		65,87		65,87		65,87	0	71,93		BKPS DM
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	51,01		18,61		46,47		15,57		17,94		17,94		17,94	0	35,17		BKPS DM
			Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	%	94,66		92		91,56		90,56		90,56		90,56		90,56	0	95,67		BKPS DM
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,5		51,92		45,94		47,59		58,3		58,3		58,3	0	115,45		BKPS DM
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	%	20	6.301.447.000	97,61	1.037.468.950	20	1.260.289.400	0	43.931.000	92	589.783.200	92	633.714.200	92	1.671.183.150	460	26,52	BKPS DM
			persentase layanan pensiun tepat waktu	%	100		100		100		100		100		100		100	0	100		
			persentase data kepegawaian yang dikelola	%	95		95		95		80		5		5		85	0	89,47		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
		Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	doku men	4	139.413.929	1	8.689.500	1	12.700.000	1	0	0	0	1	0	2	8.689.500	50	6,23			
		Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	doku men	4	6.596.920.727	1	410.988.400	1	551.574.400	0,25	31.277.900	0,25	42.118.200	0,5	73.396.100	1,5	484.384.500	37,5	7,34			
		Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	doku men	48	328.383.382	12	45.569.400	12	35.681.900	3	0	3	0	6	0	18	45.569.400	37,5	13,88			
		Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	Lemba ga	1	1.920.000.000	1	350.000.000	1	400.000.000	0	0	1	400.000.000	1	400.000.000	2	750.000.000	200	39,06			
		Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	doku men	1	208.336.900	1	199.286.400	1	208.336.900	0,25	4.255.000	0,25	139.750.000	0,5	144.005.000	1,5	343.291.400	150	164,78			
		Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	doku men	12	51.996.200	12	22.935.250	12	51.996.200	3	8.398.100	0	7.915.000	3	16.313.100	15	39.248.350	125	75,48			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																		100	51,13				
Predikat kinerja(%)																		SANGAT TINGGI	RENDAH				

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	%	70	1.012.302.900	82,4	331.381.005	70	413.340.900	35,54	95.634.500	48,1	51.626.000	48,1	147.260.500	48,1	478.641.505	68,71	47,28	BKPS DM		
		Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	dokumen	16	1.012.302.900	4	331.381.005	4	413.340.900	1	95.634.500	1	51.626.000	2	147.260.500	6	478.641.505	37,5	47,28			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			37,5	47,28			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
		Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	%	30	36.752.240.90	12,5	1.331.119.074	10	185.172.500	2	143.401.800	4	0	4	143.401.800	4	1.474.520.874	40	4,01	BKPS DM		
		Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	dokumen	48	36.752.240.90	12	1.331.119.074	12	185.172.500	3	143.401.800	3	0	6	143.401.800	18	1.474.520.874	37,5	4,01			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			37,5	4,01			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT TINGGI			
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	%	96,16	1.315.947.396	92	194.422.100	93,06	89.680.700	99,76	11.459.500	99,76	3.231.000	99,76	14.690.500	99,76	209.112.600	107,2	15,89	BKPS DM		
		Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	dokumen	8	394.919.954	2	63.528.200	2	38.610.500	1	7.540.200	0	0	1	7.540.200	3	71.068.400	37,5	18,00			
		Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	Orang	800	412.677.474	284	81.527.200	200	7.531.200	102	0	0	0	102	0	386	81.527.200	48,25	19,76			

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penanggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
		Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	Orang	620	401.755.808	170	36.300.050	120	34.226.400	0	2.753.300	20	0	20	2.753.300	190	39.053.350	30,65	9,72			
		Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Laporan	48	77.892.214	12	13.066.650	12	9.312.600	3	1.166.000	3	3.231.000	6	4.397.000	18	17.463.650	37,5	22,42			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			38,47	17,47			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			103,2	44,93			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan sarana prasarana digital pendukung kinerja kesadaran ASN untuk meningkatkan profesionalitas individu ketersediaan juknis kegiatan yang lengkap																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : pengadaan pegawai masih dalam tahap proses koordinasi dengan MenPANRB																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pencermatan anggaran kebutuhan atas kegiatan pengadaan pegawai																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : penyesuaian penganggaran pada diklat dasar sebagai tindaklanjut pengadaan pegawai baru formasi 2024																							
	Sasaran: Meningkatkan kompetensi Aparatur Sipil Negara		Sasaran: Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	%	50		75,91		49						47,59		47,59				BKPS DM		
3		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	%	96,85	855.630.908	94,93	771.108.800	96,75	1.167.474.392	97,79	52.002.200	0	479.463.700	97,79	531.465.900	191,79	1.302.574.700	101,07	152,24	BKPS DM		
			Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	%	50,5		51,92		45,94		47,59		58,3		58,3		58,3	0	115,45		BKPS DM		

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
			Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	%	51,01		18,61		46,47		15,57		17,94		17,94		17,94	0	35,17		BKPS DM		
		Pengembangan Kompetensi Teknis	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi Teknis dan sosio kultural	%	1,2	720.895.508	1,83	771.108.800	1,2	629.851.192	1,24	52.002.200	1,45	209.706.700	1,45	261.708.900	1,45	1.032.817.700	120,83	143,27	BKPS DM		
		Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang disusun	doku men	48	45.454.637	NA	NA	12	14.418.600	3	0	3	0	6	0	6	0	12,50	0,00			
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	Orang	4150	720.895.508	485	771.108.800	1000	520.804.992	1.533	52.002.200	1.758	160.939.200	1.758	212.941.400	2.243	984.050.200	54,05	136,50			

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
					5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
		Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	doku men	1000	298.313.509	NA	NA	250	94.627.600	0	0	313	48.767.500	313	48.767.500	313	48.767.500	31,30	16,35			
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			117	30,81			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	presentase ASN yang mengikuti diklat kompetensi Manajerial dan Fungsional	%	15	1.398.811.550	NA	NA	10	537.623.200	1,19	0	8,23	269.757.000	9,42	269.757.000	9,42	269.757.000	62,8	19,28	BKPS DM		
		Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional,	laporan	20	1.398.811.550	NA	NA	5	537.623.200	1	0	2	269.757.000	3	269.757.000	3	269.757.000	15	19,28			

No	Tujuan dan Sasaran	Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Target Renstra PD pada Tahun 2021-20266 (Akhir Periode Renstra)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPd Tahun 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s.d Tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s.d tahun 2024 (%)		Peran gkat Daerah Penan ggung jawab		
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
											K	Rp	K	Rp									
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10 =(8+9)		11 = (6+10)		12 = (11/5) x 100%		13		
			Kepemimpinan , dan Prajabatan																				
Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%)																			15	19,28			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT RENDAH	SANGAT RENDAH			
Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%)																			107,52	45,87			
Predikat kinerja(%)																			SANGAT TINGGI	SANGAT RENDAH			
Faktor pendorong keberhasilan kinerja : ketersediaan sumber daya pendukung pencapaian kinerja koordinasi yang baik dengan instansi penyelenggara diklat dan peningkatan kapasitas ASN																							
Faktor penghambat pencapaian kinerja : kegiatan pengiriman diklat tergantung pada instansi pelaksana, dilakukan sesuai jadwal yang ditetapkan penyelenggara																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : pelaporan atas pelaksanaan pengiriman diklat manajerial dan fungsional serta orientasi PPPK																							
Tindak lanjut yang diperlukan dalam RKPd berikutnya : pencermatan atas indikator kinerja di tahun berikutnya																							

Evaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Realisasi kinerja program yang telah melampaui target tahun 2024 sampai dengan Triwulan II adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tercapai 103,39%
2. Kegiatan yang melampaui target tahun 2024 yaitu Pengembangan Kompetensi Teknis dengan indikator Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural tercapai 152,52%
3. Sub Kegiatan yang melampaui target tahun 2024 yaitu Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum dengan indikator Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi tercapai 140%
4. Pada Program Pengembangan Sumber Daya Manusia pada indikator Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi tidak dapat memenuhi target yang ditetapkan. Beberapa kegiatan yang tidak dapat memenuhi target antara lain: kegiatan Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional, sub kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN.

Terdapat beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan target kinerja antara lain:

- a. Instansi pembina yang menaungi Jabatan Fungsional tidak mengadakan uji sertifikasi kompetensi pada tahun 2024;
- b. Jumlah Jabatan Fungsional semakin banyak tidak berbanding lurus dengan uji kompetensi yang dibuka;
- c. Jumlah ASN pada level manajerial yang belum mengikuti diklat manajerial masih sangat banyak.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam mendorong pencapaian kinerja tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan koordinasi dengan OPD yang memiliki Jabatan Fungsional untuk menghubungi kementerian instansi pembina;
- b. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas dengan instansi penyelenggara uji kompetensi jabatan fungsional;
- c. Untuk diklat manajerial tingkat pengawas akan dilakukan melalui penyelenggaraan mandiri;
- d. Memaksimalkan Sumber Daya yang ada untuk menyelenggarakan pengembangan kompetensi teknis bagi seluruh ASN melalui media digital seperti webinar kolabjar asik, pekan kolabjar dan coaching mentoring.
- e. Pendampingan kepala Perangkat Daerah atas evaluasi capaian Indeks Profesionalitas ASN
- f. Penguatan kapabilitas pada Analisis Sumber Daya Aparatur melalui bechmarking, magang, seminar, sosialisasi, workshop, coaching dan mentoring serta study komparasi.
- g. Melakukan pergeseran atas sub kegiatan yang telah tercapai kinerjanya untuk dialokasikan pada kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi dan kepegawaian.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Tahun 2024 dapat memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya.

3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran

Dari hasil evaluasi kinerja di tahun 2023, capaian sasaran Renstra “Meningkatnya Kompetensi ASN” melampaui target Renstra 2021-2026, maka dilakukan penyesuaian pada target Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024. Peningkatan capaian target kinerja tersebut salah satunya didorong dari terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 49, dimana Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran terintegrasi.

Terbitnya peraturan perundangan tersebut mendorong meningkatnya jumlah ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi, sehingga dengan alokasi anggaran yang tidak mengalami peningkatan namun secara kinerja meningkat secara signifikan. Adapun perubahan target kinerja sasaran yang mengalami perubahan sebagaiberikut:

Tabel 3.1 Perubahan Target Tujuan dan Sasaran
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2024

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Definisi Operasional	Target Tahun 2024	
				sebelum	sesudah
1	Tujuan Renstra: Meningkatnya Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	Nilai indeks yang menunjukkan kualitas profesionalitas ASN berdasarkan nilai kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai dalam melaksanakan tugas jabatan.	80,30	80,30
2	Sasaran Renstra: 1. Meningkatkan tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	Indeks Sistem Merit	Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kualitas implementasi sistem merit ASN. Penilaian dilakukan dengan memonitoring dan evaluasi atas implementasi kebijakan Sistem Merit pada Pemerintah Daerah.	280	280
3	Sasaran Renstra: 2. Meningkatkan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti Diklat dan Peningkatan Kapasitas ASN	Pendidikan dan Pelatihan Jabatan ASN yang selanjutnya disebut Diklat adalah proses penyelenggaraan belajar mengajar dalam rangka meningkatkan kemampuan ASN. Tujuan dari peningkatan kapasitas ASN adalah agar para individu dapat bermanfaat secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan dari suatu organisasi dan agar pembangunan tertata dengan baik.	14,73%	49,00%
4	Sasaran Renstra: 3. Meningkatkan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Penerapan implementasi SAKIP Perangkat Daerah yang dikeluarkan oleh Inspektorat Daerah.	A 86,36	A 86,36

3.2 Rencana Tindaklanjuti LKJIP Tahun 2023

Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja 2024 selain melakukan penyesuaian atas target Tujuan dan Sasaran Strategis, perlu difokuskan pada pemenuhan rencana tindaklanjuti yang telah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Perangkat Daerah Tahun 2023, sehingga mempercepat pemenuhan target yang ditetapkan, walaupun masih ada hal – hal lainnya yang harus diperhatikan agar kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar lebih baik lagi. Adapun rencana tindaklanjuti tersaji dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2.

Rencana Tindaklanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1	Meningkatnya tata kelola kepegawaian sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen kepegawaian yang baik	1). Melengkapi penyusunan talent pool sesuai Peraturan Menteri PANRB No. 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta;	Program : Pengembangan Sumber Daya Manusia Kegiatan: Pengembangan Kompetensi Teknis Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center
		2). Menyusun dan melaksanakan strategi/program peningkatan kompetensi pegawai (diklat, praktik kerja/magang, coaching, mentoring) berdasarkan analisis kesenjangan secara terjadwal dan dievaluasi.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan
		3). Mengimplementasikan kebijakan pola karier dengan mengacu pada manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		4). Melakukan assessment dalam proses pengisian jabatan administrator dan pengawas.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Mutasi dan Promosi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Mutasi ASN
		5). Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas permasalahan kinerja pegawai;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		6). Memanfaatkan hasil penilaian kinerja untuk membangun manajemen talenta.	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
		7). Mengintegrasikan data pelanggaran disiplin dengan sistem BKN (SI ASN)	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pembinaan Disiplin ASN Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
		8). Mengintegrasikan sistem informasi kepegawaian dengan manajemen talenta;	Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Sipil Negara	1) Memonitoring pelaksanaan pengembangan kompetensi dan hasil pengembangan kompetensi terhadap kinerja ASN.	<p>Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>
		2). Menyusun Kebijakan Coaching dan Mentoring bagi ASN dengan kriteria tertentu.	<p>Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		<p>3). Mengoptimalkan penggunaan aplikasi manajemen talenta sebagai sarana untuk mengetahui data talenta secara realtime, menjaga kualitas talenta, meningkatkan motivasi dan kinerja talenta serta memberikan kepastian arah pengembangan karir talenta melalui aplikasi manajemen talenta di SIKOI.</p>	<p>Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Assessment Center Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur Kegiatan: Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN Sub Kegiatan: Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian</p>
		<p>4). Memberikan akses, kemudahan, kecepatan dan transparansi kepada seluruh ASN untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas untuk memperoleh pengembangan kompetensi berupa BK CorpU dan Tugas Belajar melalui pemanfaatan aplikasi SMEDI SIKOI untuk seluruh Perangkat Daerah.</p>	<p>Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>

No.	Langkah Perbaikan	Rencana Tindak Lanjut	Pemetaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
		<p>5). Perumusan pengembangan kompetensi ASN secara ideal harus dapat menjawab kebutuhan ASN yang professional, melalui metode-metode baru yang berbasis pada teknologi memanfaatkan SMEDI SIKOI sehingga biaya pengembangan kompetensi menjadi lebih efisien dengan mekanisme <i>Corporate University</i> (CorpU).</p>	<p>Program : Kepegawaian Daerah Kegiatan: Pengembangan Kompetensi ASN Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</p>
3	Meningkatnya kinerja perangkat daerah	<p>1). Meningkatkan implementasi nilai – nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi disetiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi.</p>	<p>Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</p>
		<p>2). Membentuk Tim Kerja untuk menyusun rencana aksi organisasi.</p>	
		<p>3). Menyusun peta proses bisnis secara lebih mudah dipahami dan dapat diukur.</p>	

3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang kegiatan lanjutan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Secara ringkas dari total kegiatan sebanyak 13 kegiatan dan 35 sub kegiatan, terdapat 19 sub kegiatan (54,29%) tidak mengalami perubahan, sebanyak 16 sub kegiatan (45,71%) mengalami perubahan anggaran (10 sub kegiatan mengalami pengurangan dan 6 sub kegiatan mengalami penambahan pagu anggaran) di Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024. Adapun rincian perubahan kegiatan dalam Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang Mengalami Perubahan

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,5 (indeks)	83,5 (indeks)	9.276.254.499	9.091.964.011	
5	3	1	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	8.357.549.689	7.929.662.658	
5	3	1	2.02	1	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima gaji dan Tunjangan ASN	104 orang	96 orang	8.355.549.689	7.927.662.658	penyesuaian anggaran dan target kinerja karena berkurangnya jumlah PTT
5	3	1	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	250.798.100	227.602.700	
5	3	1	2.05	10	Sub kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	78.709.100	62.684.100	efisiensi anggaran fasilitasi event daerah
5	3	1	2.05	11	Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	45 orang	43 orang	122.089.000	114.918.600	terdapat peserta dengan pembiayaan oleh Perangkat Daerah Pengirim
5	3	1	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	450.075.950	553.074.693	
5	3	1	2.06	2	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 paket	3 paket	30.994.100	30.975.462	penyesuaian SSH

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	1	2.06	3	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	6.428.000	6.423.631	penyesuaian SSH
5	3	1	2.06	9	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	45 laporan	60 laporan	299.997.250	403.019.000	penambahan anggaran untuk keperluan seleksi CASN
5	3	1	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	28.976.660	176.205.260	
5	3	1	2.07	6	sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 unit	13 unit	28.976.660	176.205.260	disesuaikan kebutuhan sarana prasarana perangkat daerah
5	3	1	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	68.209.000	67.254.000	
5	3	1	2.08	2	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	1 laporan	1 laporan	955.000	-	anggaran internet di biayai oleh kominfotik
5	3	1	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	110.612.600	128.132.200	
5	3	1	2.09	2	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	74.862.600	92.382.200	pemeliharaan atas kondisi kendaraan dinas dan operasional
5	3	1	2.09	6	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	80 unit	35.750.000	35.750.000	target pemeliharaan aset menurun karena telah ada penghapusan aset

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	2			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	61,00%	61,00%	1.948.483.500	1.981.481.088	
						Persentase data kepegawaian yang valid	68,00%	68,00%	-	-	
						Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,18%	91,18%	-	-	
5	3	2				Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	91,56%	91,56%	-	-	
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	45,94%	45,94%	-	-	
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	46,47%	46,47%	-	-	
5	3	2	2.01		Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	97,61%	97,61%	1.260.289.400	1.320.978.688	
						Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	100%	-	-	
						Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	95%	-	-	
5	3	2	2.01	3	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	1 dokumen	1 dokumen	551.574.400	581.822.400	Penyesuaian belanja
5	3	2	2.01	10	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 dokumen	1 dokumen	208.336.900	239.569.660	Penambahan untuk biaya keamanan aplikasi
5	3	2	2.01	11	Sub kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	12 dokumen	12 dokumen	51.996.200	51.204.728	Penyesuaian belanja

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	3	2	2.03		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	10,00%	10,00%	185.172.500	157.680.800	
5	3	2	2.03	2	Sub kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	12 dokumen	12 dokumen	185.172.500	157.680.800	Efisiensi assessment ASN
5	3	2	2.04		Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	93,06%	93,06%	89.680.700	89.480.700	
5	3	2	2.04	7	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	120 orang	120 orang	34.226.400	34.026.400	Penyesuaian belanja
5	4	2			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,75%	96,75%	1.167.474.392	1.098.767.292	
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	45,94%	45,94%	-	-	
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	46,47%	46,47%	-	-	
5	4	2	2.01		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	1,20%	629.851.192	561.144.092	
5	4	2	2.01	1	sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 dokumen	12 dokumen	14.418.600	9.031.600	Efisiensi pada makan minum kegiatan

KODE					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Perubahan Target dan Pagu Indikatif				Keterangan
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan			Target 2024		Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	Semula	Menjadi	
5	4	2	2.01	3	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	1000 orang	1000 orang	520.804.992	550.304.992	Penambahan pelaksanaan diklat teknis
5	4	2	2.01	4	sub kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	250 dokumen	250 dokumen	94.627.600	51.807.500	efisiensi anggaran, kegiatan dilaksanakan secara MOOC

3.4 Perubahan Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 yang terdapat perubahan aktivitas disebabkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian pada anggaran gaji untuk pegawai tidak tetap yang telah berkurang karena diangkat menjadi PPPK dan telah memasuki usia pensiun;
2. Penyesuaian pada kebutuhan sarana prasarana yang menunjang kinerja organisasi;
3. Penyesuaian pada kebutuhan diklat bagi pejabat struktural dan diklat bagi pejabat fungsional tertentu yang menjadi persyaratan pengampu jabatan;
4. Efisiensi kegiatan yang telah berjalan.

Kebijakan belanja pada perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar Tahun 2024 diarahkan pada:

- Pergeseran anggaran antar kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus dikurangi atau ditambah dalam rangka pencapaian target indikator kinerja daerah pada tahun 2024;
- Adanya dua seleksi penerimaan pegawai, yaitu jalur CPNS dan jalur PPPK;
- Kondisi peralatan kerja yang membutuhkan peremajaan.

Dengan kebijakan belanja tersebut, mengakibatkan perubahan target dan pagu indikatif. Perubahan rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar tahun 2024 terlihat dalam tabel 3.4 dibawah ini:

Tabel 3.4.
Perubahan Rumusan Rencana Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03				KEPEGAWAIAN															
5	03	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	84 (indeks)	83,5 (indeks)	83,5 (indeks)	9.216.236.499	9.276.254.499	9.091.964.011			83,75 (baik)	16.380.893.099				
5	03	01	2.01		Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%	100%	100%	21.552.800	10.032.500	10.032.500			100%	9.175.500				
5	03	01	2.01	0001	Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	30 dokumen	10 dokumen	10 dokumen	9.803.800	7.068.000	7.068.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	10 dokumen	6.211.000	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
							Senula	Merjadi	RKPD 2024	ABPD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03	01	2.01	0006	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24 laporan	8 laporan	8 laporan	11.749.000	2.964.500	2.964.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	8 laporan	2.964.500	BKPSDM
5	03	01	2.02		Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	8.115.703.069	8.357.549.689	7.929.662.658						100%	15.644.162.699	BKPSDM
5	03	01	2.02	0001	Sub kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	304 orang/bulan	104 orang/bulan	96 orang/bulan	8.105.068.012	8.355.549.689	7.927.662.658		Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	98 orang	15.642.162.699	BKPSDM
5	03	01	2.02	0007	Sub kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran	36 laporan	12 laporan	12 laporan	10.635.077	2.000.000	2.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	12 laporan	2.000.000	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
																				RKPD 2024
5	03	01	2.05	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	100%	100%	100%	252.061.400	250.798.100	227.602.700				100%	157.151.300	BKPSDM			
5	03	01	2.05	0002	Sub kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	6 paket	2 paket	2 paket	50.000.000	50.000.000	50.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	2 paket	58.596.000	BKPSDM
5	03	01	2.05	0010	Sub kegiatan : Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40 orang	40 orang	40 orang	79.951.200	78.709.100	62.684.100	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	40 orang	78.574.800	BKPSDM
5	03	01	2.05	0011	Sub kegiatan : Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	40 orang	45 orang	43 orang	122.089.000	122.089.000	114.918.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	40 orang	19.980.500	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
																				36 paket
5	03	01	2.06	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase keseterediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	100%	100%	100%	500.075.950	450.075.950	553.074.693					100%	378.634.500	BKPSDM		
5	03	01	2.06	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 paket	3 paket	3 paket	30.994.100	30.994.100	30.975.462	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	1 paket	29.040.500	BKPSDM
5	03	01	2.06	0003	Sub kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	1 paket	1 paket	6.428.000	6.428.000	6.423.631	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	1 paket	5.983.800	BKPSDM
5	03	01	2.06	0004	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	108 paket	36 paket	36 paket	50.406.000	50.406.000	50.406.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	12 paket	32.400.000	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03	01	2.06	0005	Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 paket	2 paket	2 paket	42.987.600	42.987.600	42.987.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	2 paket	29.185.000	BKPSDM
5	03	01	2.06	0006	Sub kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	72 dokumen	36 dokumen	36 dokumen	8.553.000	8.553.000	8.553.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	24 dokumen	8.553.000	BKPSDM
5	03	01	2.06	0009	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	141 laporan	45 laporan	60 laporan	349.997.250	299.997.250	403.019.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	48 laporan	264.520.000	BKPSDM
5	03	01	2.06	0010	sub kegiatan : Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	10.710.000	10.710.000	10.710.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN BKPSDM	1 dokumen	8.952.200	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03	01	2.07		Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pengadaan BMD penunjang urusan sesuai kebutuhan	100%	100%	100%	28.976.660	28.976.660	176.205.260					100%	36.977.100	BKPSDM	
5	03	01	2.07	0006	sub kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 unit	2 unit	13 unit	28.976.660	28.976.660	176.205.260	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	4 unit	36.977.100	BKPSDM
5	03	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	100%	100%	100%	187.254.000	68.209.000	67.254.000						100%	75.956.000	BKPSDM
5	03	01	2.08	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	13 laporan	1 laporan	1 laporan	120.000.000	955.000	-	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	0	-	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03	01	2.08	0004	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	36 laporan	12 laporan	12 laporan	67.254.000	67.254.000	67.254.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	12 laporan	75.956.000	BKPSDM
5	03	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar	100%	100%	100%	110.612.600	110.612.600	128.132.200						100%	78.836.000	BKPSDM
5	03	01	2.09	0002	Sub kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 unit	10 unit	10 unit	74.862.600	74.862.600	92.382.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	10 unit	49.222.000	BKPSDM
5	03	01	2.09	0006	Sub kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	92 unit	92 unit	80 unit	35.750.000	35.750.000	35.750.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN BKPSDM	80 unit	29.614.000	BKPSDM *

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggung- jawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03	02			Program Kepegawaian Daerah	Persentase pemenuhan pegawai sesuai kebutuhan	74,00%	61,00%	61,00%	1.853.483.500	1.948.483.500	1.981.481.088				67,00%	1.762.240.050	BKPSDM		
						Persentase data kepegawaian yang valid	78,00%	68,00%	68,00%	-	-	-				73,00%	-	BKPSDM		
						Persentase penempatan jabatan sesuai kompetensi	91,58%	91,18%	91,18%	-	-	-				91,38%	-	BKPSDM		
						Persentase ASN yang memiliki nilai Prestasi Kinerja minimal 80	94,66%	91,56%	91,56%	-	-	-				91,56%	-	BKPSDM		
						Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%	45,94%	45,94%	-	-	-				45,94%	-	BKPSDM		
						Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%	46,47%	46,47%	-	-	-				46,47%	-	BKPSDM		
5	03	02	2.01		Kegiatan : Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase usulan Formasi ASN yang disetujui	8,00%	8,00%	8,00%	1.165.289.400	1.260.289.400	1.320.978.688				8,00%	1.196.847.050	BKPSDM		

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
					Persentase layanan pensiun tepat waktu	100%	100%	100%	-	-	-				100%	-	BKPSDM			
					Persentase data kepegawaian yang dikelola	95%	95%	95%	-	-	-				50%	-	BKPSDM			
5	03	02	2.01	0002	Sub Kegiatan : Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	12.700.000	12.700.000	12.700.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	0	0	BKPSDM
5	03	02	2.01	0003	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	596.574.400	551.574.400	581.822.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	2 dokumen	522.895.350	BKPSDM
5	03	02	2.01	0006	Sub kegiatan : Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	35.681.900	35.681.900	35.681.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 dokumen	29.277.600	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab				
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif		
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah	
																				RKPD 2024
5	03	02	2.01	0008	Sub kegiatan : Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	3 lembaga	1 lembaga	1 lembaga	400.000.000	400.000.000	400.000.000	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1 lembaga	450.000.000	BKPSDM
5	03	02	2.01	0010	Sub Kegiatan : Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	208.336.900	208.336.900	239.569.660	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1 dokumen	194.674.100	BKPSDM
5	03	02	2.01	0011	Sub kegiatan : Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	51.996.200	51.996.200	51.204.728	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	0	0	BKPSDM
5	03	02	2.02		Kegiatan : Mutasi dan Promosi ASN	Persentase ASN yang ditempatkan	70,00%	70,00%	70,00%	413.340.900	413.340.900	413.340.900						70,00%	366.678.800	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegi- atan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Akhir Period e RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompo k Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggu ngjawab					
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif			
							Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah		
5	03	02	2.02	0001	Sub kegiatan : Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	12 dokumen	4 dokumen	4 dokumen	413.340.900	413.340.900	413.340.900	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkung an Pemerint ah Kota Blitar	4 dokumen	366.678.800	BKPSDM	
5	03	02	2.03		Kegiatan : Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase talent pool ASN yang dikelola	30,00%	10,00%	10,00%	185.172.500	185.172.500	157.680.800						17,00%	126.836.200	BKPSDM	
5	03	02	2.03	0002	Sub kegiatan: Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	36 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	185.172.500	185.172.500	157.680.800	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkung an Pemerint ah Kota Blitar	12 dokumen	126.836.200	BKPSDM	
5	03	02	2.04		Kegiatan : Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase SKP yang diverifikasi	96,16%	93,06%	93,06%	89.680.700	89.680.700	89.480.700							96,00%	71.878.000	BKPSDM
5	03	02	2.04	0002	Sub kegiatan : Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	6 dokumen	2 dokumen	2 dokumen	38.610.500	38.610.500	38.610.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik	ASN di lingkung an Pemerint ah Kota Blitar	2 Laporan	30.590.500	BKPSDM	

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	03	02	2.04	0004	Sub Kegiatan: Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	600 orang	200 orang	200 orang	7.531.200	7.531.200	7.531.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	584 orang	5.660.800	BKPSDM
5	03	02	2.04	0007	Sub kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	460 orang	120 orang	120 orang	34.226.400	34.226.400	34.026.400	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	0	-	BKPSDM
5	03	02	2.04	0008	Sub kegiatan: Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	36 laporan	12 laporan	12 laporan	9.312.600	9.312.600	9.312.600		Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 laporan	35.626.700	BKPSDM

KODE				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
							Samula	Merjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	04			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN										1.069.639.200	BKPSDM				
5	04	02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN dengan pendidikan tinggi dan menengah	96,85%	96,75%	96,75%	1.167.492.392	1.072.846.792	1.148.767.292			96,75%	1.069.639.200	BKPSDM			
					Persentase ASN yang memperoleh peningkatan kompetensi	50,50%	45,94%	45,94%	-	-	-			45,94%	-	BKPSDM			
					Persentase ASN tenaga fungsional bersertifikat kompetensi	51,01%	46,47%	46,47%	-	-	-			46,47%	-	BKPSDM			
5	04	02	2.01	Kegiatan : Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis dan sosio kultural	1,20%	1,20%	1,20%	723.777.392	535.223.592	611.144.092			1,20%	552.437.500	BKPSDM			
5	04	02	2.01	0001 sub kegiatan: Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang,	48 dokumen	12 dokumen	12 dokumen	14.418.600	14.418.600	9.031.600	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	12 dokumen	10.569.500	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
					Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun														
5	04	02	2.01	0003	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	4150 orang	1.000 orang	1.000 orang	614.731.192	520.804.992	550.304.992	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	1400 orang	447.909.700	BKPSDM
5	04	02	2.01	04	sub kegiatan: Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	1.000 dokumen	250 dokumen	250 dokumen	94.627.600	0	51.807.500	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	550 dokumen	93.958.300	BKPSDM
5	04	02	2.02		Kegiatan: Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang mengikuti diklat Kompetensi Manajerial dan Fungsional	15,00%	10,00%	10,00%	443.715.000	537.623.200	537.623.200						10,00%	517.201.700	BKPSDM

KODE					Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Akhir Periode RPJMD	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan						Kelompok Sasaran	Perkiraan Maju Rencana		PD Penanggungjawab			
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				Target 2024		Pagu Indikatif			Lokasi		Sumber Dana	Prioritas		Target	Pagu Indikatif	
								Semula	Menjadi	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD Perubahan 2024				Nasional				Daerah
5	04	02	2.02	0007	Sub kegiatan : Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	15 Laporan	5 Laporan	5 Laporan	443.715.000	537.623.200	537.623.200	Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	Pendapatan Bagi Hasil	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Peningkatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan peningkatan kualitas pelayanan publik bagi Masyarakat di Jawa Timur Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi	ASN di lingkungan Pemerintah Kota Blitar	5 Laporan	517.201.700	BKPSDM

Sumber : SIPD BKPSDM Kota Blitar, Juli 2024

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2016-2024 maupun yang terkait dengan perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

4.1. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024, merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut, maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

- Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Blitar Tahun 2024.
- BKPSDM Kota Blitar secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
 - melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
 - menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
- Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

4.2. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RKPD Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja BKPSDM Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.